



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERIKANAN

Jl. Sungai Limboto No. 116, Luwuk 94713
email ; diskan_banggai@gmail.com

LAPORAN EVALUASI INTERNAL

**PROGRAM DAN KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA AKSI**

TRIWULAN II (DUA)

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERIKANAN

Jl. Sungai Limboto No. 116 Luwuk – Banggai Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Triwulan II Tahun 2020 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Dinas Perikanan sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banggai.

Hasil evaluasi internal Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Banggai penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Banggai yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Luwuk, Juli 2020
Kepala Dinas Perikanan

Drs. Benyamin Pongdatu, M.Si

Pembina Tkt, I

Nip. 19670604 199303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERIKANAN

Jl. Sungai Limboto No 116

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Evaluasi	1
C. Gambaran Umum Inspektorat Daerah.....	
1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kab. Banggai.....	2
2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi	2
BAB II EVALUASI	
A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan	10
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran	12
C. Evaluasi atas Capaian IKU	13
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi	15
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
A. Permasalahan.....	17
B. Rekomendasi.....	17
BAB IV PENUTUP.....	18



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS PERIKANAN

Jl. Sungai Limboto No 116 Luwuk – Banggai Sulawesi Tengah

**LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2020**

NOMOR :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2020.
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan *berikutnya* . tahun 2020

C. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

1. Visi dan Misi Kabupaten Banggai

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banggai, untuk itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pembangunan sektor lain, ini berarti bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus terus ditingkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah laut nasional yang berkelanjutan.

Secara kongkrit pembangunan Kelautan dan Perikanan di jabarkan dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”**

2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

c. Susunan dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.
 - Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
 - Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
 - Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
 - Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
 - d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
 - Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

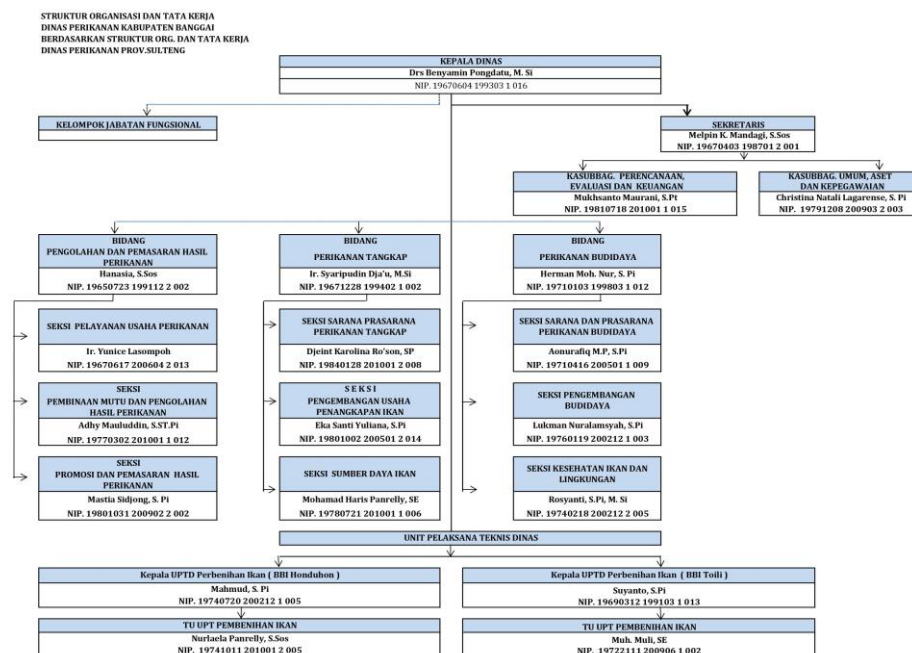
Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Seksi Bagian Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Seksi Bagian Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Seksi Bagian Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Adapun struktur Organisasi adalah sebagai berikut :



d. Uraian Tugas dan Fungsi

1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

(a) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
- (1) perumusan kebijakan di bidang perikanan;
 - (2) pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - (4) pelaksanaan administrasi di bidang perikanan; dan
 - (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas :
- (a) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas sdan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
- (1) penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas Perikanan;
 - (2) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perikanan;
 - (3) pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan;
 - (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;
 - (5) pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
 - (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi umum, aset dan kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

- 5) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai
 - a) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 4. pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Kepala Seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan usaha perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pelayanan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi

tugas pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

- 8) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas promosi dan pemasaran hasil perikanan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perikanan tangkap meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengembangan usaha penangkapan ikan dan sumber daya ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan perikanan tangkap;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
 4. pelaksanaan administrasi dinas perikanan tangkap; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- 10) Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas sarana prasarana perikanan tangkap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan usaha penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Kepala Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sumber daya ikan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengembangan sumber daya ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 13) Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- a) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perikanan budidaya meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengembangan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan perikanan budidaya;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya;
 4. pelaksanaan administrasi bidang perikanan budidaya; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- 14) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan budidaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Kepala Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan budidaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 16) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan administrasi tugas kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 17) Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan.
 - (2) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang -undangan yang berlaku

BAB II

EVALUASI

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Evaluasi atas capaian program pada triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	770.046.600	385.993.595	50 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0 %

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.956.000	8.468.000	94,55 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.036.000	30.456.000	78 %
5	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	20.627.000	18.912.000	92 %
6	Program Pengembangan Budidaya	35.958.000	35.958.000	100 %
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	237.602.731	67.400.000	28 %
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan	26.979.000	16.947.000	63 %
	TOTAL	1.139.206.086	564.134.595	50 %

Untuk Evaluasi capaian kegiatan pada triwulan I dapat di lihat pada lampiran 1, laporan TEPPRA Format C.1 Dinas Perikanan kabupaten Banggai.

Secara umum untuk program dan kegiatan pada dinas perikanan khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa realisasi fisik belum ada progres masih dalam tahapan penyusunan HPS dan sebagian dalam proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan progres kegiatan umumnya masih pada tahapan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran serta kegiatan verifikasi terkait lokasi maupun calon penerima bantuan.

Untuk Evaluasi program dan kegiatan beberapa program telah menunjukkan progres pelaksanaan khususnya pada program 1 sampai dengan program 8 atau program yang berkaitan dengan pelaksanaan rutin dan administrasi perkantoran,.

Pada Program Pengembangan Perikanan tangkap untuk progres keuangannya masih rendah sekali yaitu mencapai 28 % untuk kegiatan yang sifatnya perjalanan dinas memonitoring pelaksanaan kartu nelayan sekahterah, yang saat ini rendahnya progres di karenakan keterlambatan dalam proses kontak yang di sebabkan pada beberapa kegiatan yang harus di rasionalisasikan yang sumber dananyan dari DAK yang di tarik oleh kementerian.

Beberapa kegiatan telah mencapai progres yang sangat baik dalam hal ini telah mencapai realisasi keuangan di atas 50 % serta ada beberapa kegiatan sudah dilaksanakan sudah mencapai 100 % namun ada juga beberapa kegiatan yang belum melaksanakan kegiatan sehingga hal ini yang menghambat atas capaian realisasi program dan kegiatan. Untuk kegiatan yang telah memiliki progres di atas 50 % adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran kegiatan yang telah mencapai progres baik yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan Makan dan Minum
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah

Untuk beberapa program dan kegiatan belum menunjukkan progres yang sangat baik dalam hal ini capaian realisasi masih sangat rendah atau di bawah 25 %. Khususnya untuk program dan kegiatan yang terdapat pada masing-masing bidang yaitu bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2020 sesuai tabel realisasi keuangan dinas perikanan kabupaten banggai berdasarkan format TEPPRA format C.1 (pada Lampiran 2).

Untuk evaluasi realisasi anggaran Persentase rata-rata capaian realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2020 Dinas perikanan kabupaten banggai rata-rata realisasi anggaran yaitu sebesar 50 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 564.134.000,- dari total pagu Rp. 1.139.206.086 dalam kategori masih belum lewat dari 60 % tapi ini sudah bagus karena adanya peningkatan terhadap triwulan sebelumnya hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Beberapa kegiatan belanja hibah atau belanja barang yang di serahkan ke masyarakat itu terhambat di karenakan beberapa kali Penyusunan DPA melakukan pergeseran sehingganya khususnya pada pengadaan alat pancing dan pengdaan kapal.

Untuk tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian realisasi anggaran pada triwulan I adalah :

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan baik Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala seksi pelaksana kegiatan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan serta melakukan monitoring pelaksanaan di tingkat lapangan untuk mengecek calon pelaksanaan kegiatan.
2. Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas, kepala bidang dan juga Pejabat pembuat komitmen atas pelaksanaan kegiatan.
3. Seluruh elemen pada dinas perikanan harus bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan pada dinas perikanan tahun 2020.

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II tahun 2020 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi TW I
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	90,90%	37,00%
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	90,90%	41,00%
2	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	90,90%	20,00%

Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan I masih kurang baik dapat di jelaskan sebagai berikut :

sasaran strategis Meningkatnya produksi hasil perikanan pada indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target yaitu 90,90 % dengan asumsi target jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 818,10 Ton dan target akhir renstra sebesar 900 Ton dengan formulasi perhitungan target jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2020 di bagi jumlah target produksi perikanan budidaya akhir renstra di kalikan 100 % maka di peroleh target tahun 2020 sebesar 90,90 %. Sedangkan untuk realisasi persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan II yaitu sebesar 37,00 %, masih bisa dikatakan relevan dengan target yang di berikan

mudah - mudahan dapat tercapai pada Triwulan IV agar dapat mendongkrak target akhir restra.

Untuk indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target yaitu 90,90 % dengan asumsi target jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 18.182 Ton dan target akhir renstra sebesar 20.000 Ton dengan formulasi perhitungan target jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 di bagi jumlah target produksi perikanan tangkap akhir renstra di kalikan 100 % maka di peroleh target tahun 2020 sebesar 90,90 %. Sedangkan untuk realisasi persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sampai dengan triwulan I yaitu sebesar 41,00 %, dengan rincian yaitu produksi perikanan tangkap triwulan 1 sebesar 9.023 Ton, maka di peroleh jumlah produksi perikanan tangkap sampai dengan triwulan I yaitu 9.023 Ton, sehingga persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada triwulan I mencapai 41,00 % hal ini masih sangat relevan dengan target yang di berikan dan di harapkan target ini akan tercapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020.

Untuk indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan target yaitu 90,90 % dengan asumsi target jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 sebesar 2.727.300 kg dan target akhir renstra sebesar 3.000.000 Kg dengan formulasi perhitungan target jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 di bagi jumlah target produksi olahan hasil perikanan akhir renstra di kalikan 100 % maka di peroleh target tahun 2020 sebesar 90,91 %. Sedangkan untuk realisasi persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sampai dengan triwulan I yaitu sebesar 20,00 %, dengan rincian yaitu produksi olahan hasil perikanan bulan januari sampai dengan Juni sebesar 390.000 Kg, sehingga persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan pada triwulan II mencapai 20 % hal ini masih sangat rendah di tim data statistik di karenakan terhambatnya data dengan target yang di berikan dan di harapkan target ini akan tercapai sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020.

D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi triwulan I tahun 2020 sesuai tabel pada lampiran 3 Rencana Aksi dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 2020 pada triwulan III semua program telah di laksanakan dan ada beberapa kegiatan yang telah di laksanakan yaitu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor.

- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah.
- Rapat-rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan

- Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Program dan kegiatan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
- Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

b. Program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 2020 pada triwulan III adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
- Penyusunan dokumen RKBU Perangkat Daerah

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan

- Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pencetakan Kolam/Tambak Ikan
- Sosialisasi dan pembinaan kelompok budidaya
- Pengembangan sarana prasarana balai benih
- Pengolahan Data Statistik Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Fasilitasi kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
- Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI
- Sosialisasi dan pembinaan perikanan tangkap
- Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
- Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Promosi dan pameran
- Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil perikanan
- Pelatihan pengolahan Hasil perikanan
- Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan
- Pengadaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai samapi dengan triwulan I bulan Januari sampai dengan maret 2020, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Beberapa kegiatan belanja hibah atau belanja barang yang di serahkan ke masyarakat itu terhambat di karenakan beberapa kali Penyusunan DPA melakukan pergeseran sehingganya khususya pada pengadaan alat pancing dan pengdaan kapal.
2. Masih kurangnya data stistuiik pengolahan hasil perikanan karena dampak pada pengurangan anggaran serta membuat pemungut data tidak dapat mengambil data di lapangan

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan baik Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala seksi pelaksana kegiatan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan serta melakukan monitoring pelaksanaan di tingkat lapangan untuk mengecek calon pelaksanaan kegiatan.
2. Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas, kepala bidang dan juga Pejabat pembuat komitmen atas pelaksanaan kegiatan.
3. Seluruh elemen pada dinas perikanan harus bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan pada dinas perikanan tahun 2020.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si

Pembina Utama Muda IV/b

NIP. 19670604 199303 1 016



KABUPATEN BANGGAI

RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD 2020

DINAS PERIKANAN

FORMAT C1

PA/KPA		Nama PA/KPA						No. HP				Total			
DISKAN		Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si						0813 2245 0139				201 Pkt/Belanja		Rp. 1.139.206.086	
Keterangan Status → Biru : Selesai Pelaksanaan (Fisik 100%) Hijau : Dalam Pelaksanaan Kuning : Belum Pelaksanaan Merah : Jatuh Tempo Tgl Pelaksanaan															
No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Lokasi Kegiatan (Kab/Kec)	Penyedia	Tgl Pelaksanaan		Realisasi					Sisa Pagu (Rp)	Status (B/H/K/M)	PERMASALAHAN
						Awal	Akhir	31 Mei 2020		30 Jun 2020					
								Keu	Fis	Keu	Fis	Fis			
						%	%	Rp	%	%					
TOTAL			1.139.206.086,00						564.134.595,00	49,52	49,52	575.071.491,00			
Keg : Penyediaan jasa surat menyurat			1.200.000,00						936.000,00	78,00	78,00	264.000,00			
1	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	BJ	1.200.000,00	KAB					936.000	78,00	78,00	264.000	H		
Keg : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			85.800.000,00						35.040.995,00	40,84	40,84	50.759.005,00			
2	Belanja Air	BJ	1.800.000,00	KAB					386.000	21,44	21,44	1.414.000	H		
3	Belanja Listrik	BJ	54.000.000,00	KAB					22.651.413	41,95	41,95	31.348.587	H		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	BJ	30.000.000,00	KAB					12.003.582	40,01	40,01	17.996.418	H		
Keg : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			-						-	-	-	-			
6	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-					-	-	-	-	M		
Keg : Penyediaan jasa kebersihan kantor			13.000.000,00						13.000.000,00	100,00	100,00	-			
7	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	BJ	13.000.000,00	KAB					13.000.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Penyediaan alat tulis kantor			7.000.000,00						7.000.000,00	100,00	100,00	-			
8	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	7.000.000,00	KAB					7.000.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			2.000.000,00						2.000.000,00	100,00	100,00	-			
9	Belanja Penggandaan	BJ	2.000.000,00	KAB					2.000.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Penyediaan makanan dan minuman			8.280.000,00						8.250.000,00	99,64	99,64	30.000,00			
11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	BJ	8.280.000,00	KAB					8.250.000	99,64	99,64	30.000	H		
Keg : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			44.816.600,00						44.816.600,00	100,00	100,00	-			
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	BJ	44.816.600,00	KAB					44.816.600	100,00	100,00	-	B		
Keg : Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			28.550.000,00						28.550.000,00	100,00	100,00	-			
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	28.550.000,00	KAB					28.550.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Penyediaan jasa administrasi perkantoran			579.400.000,00						246.400.000,00	42,53	42,53	333.000.000,00			
17	Honorarium K2	BLP	108.000.000,00	-					45.000.000	41,67	41,67	63.000.000	H		
18	Honorarium Non K2	BLP	470.400.000,00	-					200.400.000	42,60	42,60	270.000.000	H		
19	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	1.000.000,00	KAB					1.000.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			-						-	-	-	-			
21	Belanja Jasa Service	BJ	-	KAB					-	-	-	-	M		
Keg : Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur			8.956.000,00						8.468.000,00	94,55	94,55	488.000,00			
22	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	6.020.000,00	KAB					6.000.000	99,67	99,67	20.000	H		
23	Belanja Penggandaan	BJ	2.000.000,00	KAB					2.000.000	100,00	100,00	-	B		
24	Belanja Penjilidan	BJ	936.000,00	KAB					468.000	50,00	50,00	468.000	H		
Keg : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			6.024.000,00						6.024.000,00	100,00	100,00	-			
25	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	5.000.000,00	KAB					5.000.000	100,00	100,00	-	B		
26	Belanja Penggandaan	BJ	400.000,00	KAB					400.000	100,00	100,00	-	B		
27	Belanja Penjilidan	BJ	624.000,00	KAB					624.000	100,00	100,00	-	B		
Keg : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			-						-	-	-	-			
28	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB					-	-	-	-	M		
29	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB					-	-	-	-	M		
30	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB					-	-	-	-	M		
Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD			28.380.000,00						19.800.000,00	69,77	69,77	8.580.000,00			
35	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	14.000.000,00	KAB					7.000.000	50,00	50,00	7.000.000	H		
36	Belanja Penggandaan	BJ	4.800.000,00	KAB					4.000.000	83,33	83,33	800.000	H		
37	Belanja Penjilidan	BJ	1.560.000,00	KAB					780.000	50,00	50,00	780.000	H		

No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Lokasi Kegiatan (Kab/Kec)	Penyedia	Tgl Pelaksanaan		Realisasi					Sisa Pagu (Rp)	Status (B/H/K/M)	PERMASALAHAN
						Awal	Akhir	31 Mei 2020		30 Jun 2020					
								Keu	Fis	Keu		Fis			
								%	%	Rp	%	%			
35	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	8.020.000,00	KAB					8.020.000	100,00	100,00	-	B		
	Keg : Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah		4.632.000,00						4.632.000,00	100,00	100,00	-			
38	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	4.000.000,00	KAB				4.000.000	100,00	100,00	-	B			
39	Belanja Penggandaan	BJ	320.000,00	KAB				320.000	100,00	100,00	-	B			
40	Belanja Penjilidan	BJ	312.000,00	KAB				312.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan		15.315.000,00					13.600.000,00	88,80	88,80	1.715.000,00				
41	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
42	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
43	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
45	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	15.315.000,00	KAB				13.600.000	88,80	88,80	1.715.000	H			
	Keg : Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/PHU)		5.312.000,00					5.312.000,00	100,00	100,00	-				
46	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	4.000.000,00	KAB				4.000.000	100,00	100,00	-	B			
47	Belanja Penggandaan	BJ	1.000.000,00	KAB				1.000.000	100,00	100,00	-	B			
47	Belanja Penjilidan	BJ	312.000,00	KAB				312.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan		13.742.000,00					13.742.000,00	100,00	100,00	-				
49	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	5.000.000,00	KAB				5.000.000	100,00	100,00	-	B			
50	Belanja Penggandaan	BJ	2.000.000,00	KAB				2.000.000	100,00	100,00	-	B			
51	Belanja Penjilidan	BJ	312.000,00	KAB				312.000	100,00	100,00	-	B			
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	6.430.000,00	KAB				6.430.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pencetakan Kolam / Tambak Ikan		3.070.000,00					3.070.000,00	100,00	100,00	-				
56	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	3.070.000,00	KAB				3.070.000	100,00	100,00	-	B			
57	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
57	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
58	Cetak kolam ikan Molino Kec.Luwuk Timur	BJ	-	LUTIM				-	-	-	-	M			
	Keg : Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya		4.632.000,00					4.632.000,00	100,00	100,00	-				
60	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	4.000.000,00	KAB				4.000.000	100,00	100,00	-	B			
63	Belanja Penggandaan	BJ	320.000,00	KAB				320.000	100,00	100,00	-	B			
64	Belanja Penjilidan	BJ	312.000,00	KAB				312.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih		4.490.000,00					4.490.000,00	100,00	100,00	-				
67	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
68	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk UPTD Perbenihan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
69	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
70	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
68	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	4.490.000,00	KAB				4.490.000	100,00	100,00	-	B			
71	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
72	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
73	Rehab Kolam UPT Perbenihan	BM	-	LUTIM				-	-	-	-	M			
	Keg : Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya		5.000.000,00					5.000.000,00	100,00	100,00	-				
74	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
75	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
76	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
77	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	5.000.000,00	KAB				5.000.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pengolahan data statistik perikanan budidaya		5.024.000,00					5.024.000,00	100,00	100,00	-				
78	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	4.000.000,00	KAB				4.000.000	100,00	100,00	-	B			
79	Belanja Penggandaan	BJ	400.000,00	KAB				400.000	100,00	100,00	-	B			
79	Belanja Penjilidan	BJ	624.000,00	KAB				624.000	100,00	100,00	-	B			
	Keg : Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap		223.202.731,00					53.000.000,00	23,75	23,75	170.202.731,00				
87	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			
88	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB				-	-	-	-	M			

No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Lokasi Kegiatan (Kab/Kec)	Penyedia	Tgl Pelaksanaan		Realisasi					Sisa Pagu (Rp)	Status (B/H/K/M)	PERMASALAHAN		
						Awal	Akhir	31 Mei 2020		30 Jun 2020							
								Keu	Fis	Keu		Fis					
								%	%	Rp	%	%					
89	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
90	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	3.202.731,00	KAB						3.200.000	99,91	99,91	2.731				
92	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Desa Ondoliang Kec. Balantak Utara	BJ	170.000.000,00	KAB									170.000.000				
95	pengadaan Alat Pancing (Desa Pandan Wangi Kec. Toili barat, Desa Dongin Kec. Toili barat)	BJ	50.000.000,00	KAB						49.800.000	99,60	99,60	200.000				
	Keg : Fasilitas Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap		12.000.000,00							12.000.000,00	100,00	100,00	-				
97	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB													
99	Jasa Pembukanaan Rekening Bank	BJ	-	KAB													
98	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB													
100	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
101	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	12.000.000,00	KAB						12.000.000	100,00	100,00	-				
	Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI		-							-	-	-	-				
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	BJ	-	KAB													
103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	BJ	-	KAB													
103	Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bungawon kec. Pagimana	BM	-	PAGIMANA													
104	Pembangunan tambatan perahu Kel. Bunta I kec. Bunta	BM	-	BUNTA													
	Keg : Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap		2.400.000,00							2.400.000,00	100,00	100,00	-				
114	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB													
115	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB													
116	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
115	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	2.400.000,00	KAB						2.400.000	100,00	100,00	-				
	Keg : Promosi dan Pameran		12.312.000,00							6.312.000,00	51,27	51,27	6.000.000,00				
122	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	5.000.000,00	KAB						5.000.000	100,00	100,00	-				
130	Belanja Penggandaan	BJ	1.000.000,00	KAB						1.000.000	100,00	100,00	-				
131	Belanja Penjilidan	BJ	312.000,00	KAB						312.000	100,00	100,00	-				
137	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	6.000.000,00	KAB									6.000.000				
	Keg : Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan		3.000.000,00							-	-	-	3.000.000,00				
140	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB													
144	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB													
145	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
141	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	3.000.000,00	KAB									3.000.000				
	Keg : Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan		5.730.000,00							5.730.000,00	100,00	100,00	-				
148	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB													
153	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB													
154	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
149	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	5.730.000,00	KAB						5.730.000	100,00	100,00	-				
	Keg : Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan		5.937.755,00							4.905.000,00	82,61	82,61	1.032.755,00				
167	Belanja Alat Tulis Kantor	BJ	-	KAB													
170	Belanja Penggandaan	BJ	-	KAB													
171	Belanja Penjilidan	BJ	-	KAB													
168	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	BJ	5.937.755,00	KAB						4.905.000	82,61	82,61	1.032.755				

Mengetahui :
KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. BANGGAI

Luwuk, 02 Juli 2020
KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016

MUKHSANTHO MAURANI, S.Pt
NIP. 19810718 201001 1 015